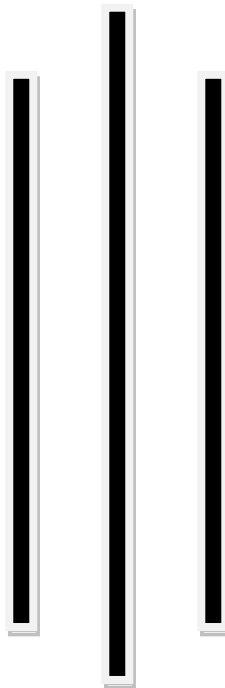


**LAPORAN  
KINERJA  
( LKj )**  
TAHUN ANGGARAN 2022



# **BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI**

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematisasi LKjIP

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Struktur Organisasi  
Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026  
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Mendorong Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum Setda Provinsi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

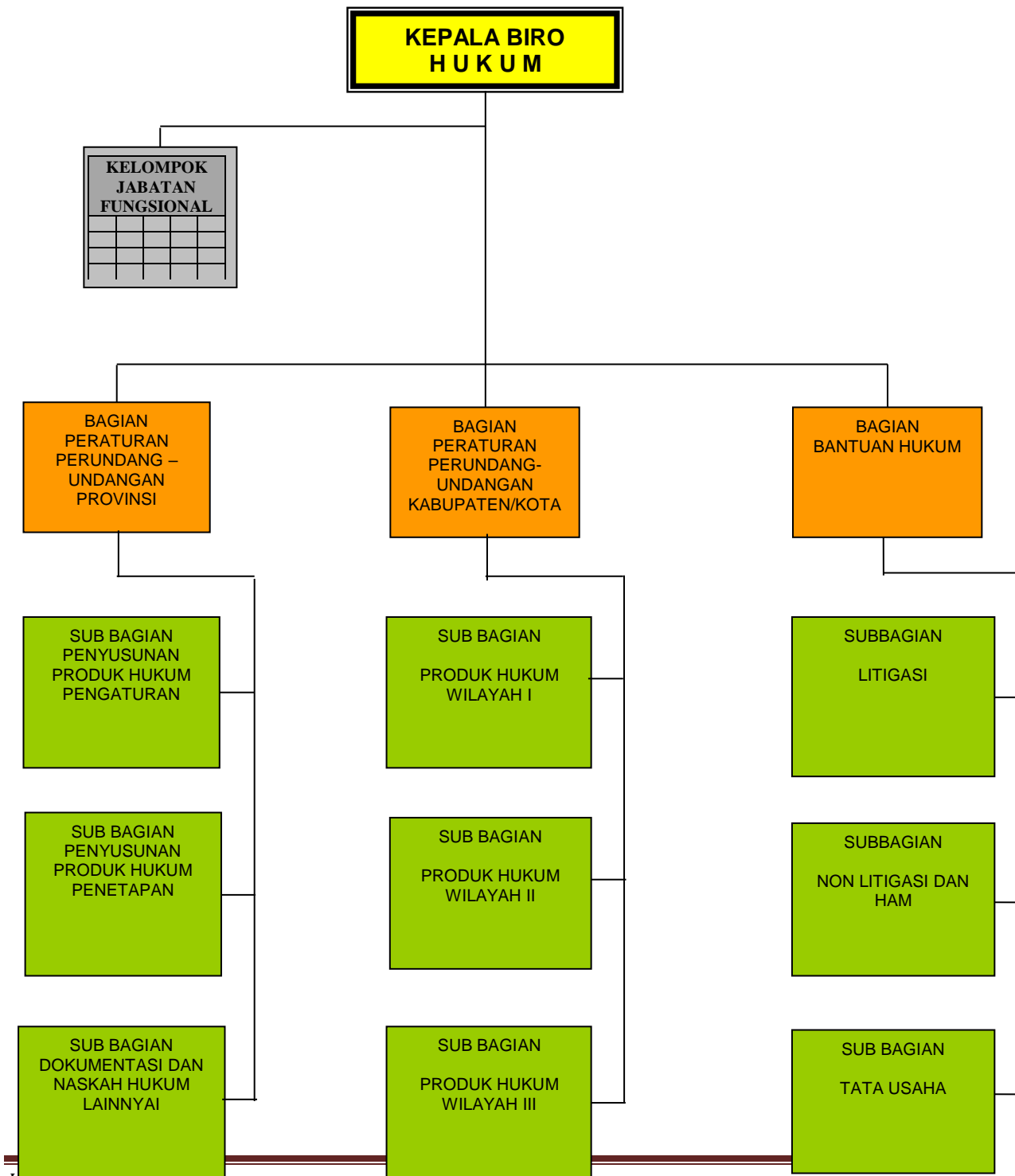
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Perundang-undangan Provinsi terdiri dari :
  - Sub Bagian Produk Hukum Pengaturan.
  - Sub Bagian Produk Hukum Penetapan.
  - Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah hokum lainnya.
- b. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kotatertdiri dari :
  - Sub Bagian Sengketa Hukum.
  - Sub Bagian Bantuan Hukum.
  - Sub Bagian Penegakan Hak Azasi Manusia dan Penyuluhan Hukum.
- c. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :
  - Sub Bagian Litigasi.
  - Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
  - Sub Bagian Tata Usaha..

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Biro Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi**



## 1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi.

“Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

### **1.3. Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pembinaan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas.

4. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah guna diklarifikasi.
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

#### 1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 11 (sembilan) Fungsional Tertentu dan 15 (lima belas) orang staf fungsional umum.

Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2021 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan.

<b>Tabel 1.1</b>						
<b>Komposisi Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi</b>						
NO	JENIS JABATAN	GOLONGAN PEGAWAI				JUMLAH (orang)
		IV	III	II	I	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	2	-	-	-	2
3	ESELON IV	-	1	-	-	1

4	FUNGSIONAL TERTENTU	1	10	-	-	11
5	FUNGSIONAL UMUM	1	13	1	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>30</b>

### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan computer, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Secara lebih rinci sarana dan prasarana yang ada di Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.2**

#### **Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun**

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi
1	Alat-alat angkutan		Baik
2	Alat kantor dan rumah tangga		Baik
3	Alat studio dan alat komunikasi		Baik
4	Bangunan gedung		Baik
5	Jaringan		Baik
6	Buku Perpustakaan		Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana yang

dimiliki, secara rutin perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan dan pergantian sarana dan prasarana yang tidak dapat berfungsi secara optimal.

#### **1.6. Keuangan**

Dukungan dana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.564.560.000,- ( Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan 2 Program, 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.

#### **1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana dan Sistematika Penulisan Lkj.

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah

#### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Renstra Biro Hukum sendiri dituangkan dalam renstra Sekretaris Daerah untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra Biro Hukum Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan.

##### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi

Jambi, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Visi Misi Gubernur Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya.

Visi Pembangunan Provinsi Jambi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu: **"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"**.

**Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

**Jambi Aman** : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

**Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat

dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

**Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

**Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, Misi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ada 3 (tiga) misi yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### **Tujuan**

Bertolak dari Visi dan Misi Gubernur Jambi, maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan Pemerintah Pusat.
2. Mewujudkan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat.
3. Terlaksananya penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah Provinsi Jambi serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur di bagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum dilingkungan pemerintahan daerah.
4. Terlaksananya pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum.

#### **Sasaran**

Untuk mencapai hasil secara nyata Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terevaluasi/terfasilitasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang berprofesional dan berkualitas.
4. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Hukum beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

<b>Tabel 2.1</b>										
<b>Sasaran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026</b>										
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangdan kebutuhan masyarakat	Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi )	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )	100% ( 7096 Produk Hukum Provinsi )
		Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (520 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	100% (600 Produk Hukum Kab/Kota)

		Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2022 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi membuat Perjanjian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### **Perjanjian Kinerja Tahun 2021.**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya penataan produk hukum daerah dan budaya taat hukum	1. Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%
	4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi	80%
	5. Nilai IKM	80 point

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rp. 245.315.110,-</b>	
<b>2</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Rp. 1.519.240.750 ,-</b>	

### **2.3. Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran**

Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagai berikut :

#### **1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

##### **Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**

Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

##### **Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sub Kegiatan: Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

#### **2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

##### **Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana APBD.

Pada Bab ini akan diuraikan hasil capaian indikator utama, evaluasi dan analisis kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, serta pertanggungjawaban dari aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan terkait beserta strategi pemecahan masalah.

### **3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022**

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Indikator yang menjadi ukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah  
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraa.	1. Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		2. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		3. Persentase penyelesaian permasalahan hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi
		4. Persentase produk hukum provinsi yang dapat diakses publik

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	1. Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi )	20% (660 Produk Hukum Provinsi )	20% (660 Produk Hukum Provinsi )	20% (660 Produk Hukum Provinsi )	20% (660 Produk Hukum Provinsi )	20% (660 Produk Hukum Provinsi )	100% ( 7096 Produk Hukum Provinsi )
			2. Persentase Produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100% (450 Produk Hukum Kab/Kota)	20% (90 Produk Hukum Kab/kota )	20% (90 Produk Hukum Kab/kota )	20% (90 Produk Hukum Kab/kota )	20% (90 Produk Hukum Kab/kota )	20% (90 Produk Hukum Kab/kota )	100% ( 7096 Produk Hukum Provinsi )
			2. Persentase penyelesaian permasalahan hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi	90 % (50 kasus/perkara)	16 %	16 %	16%	16 %	16 %	80 %
			4. Persentase Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik	100 %	20%	20%	20%	20%	20%	100%

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didapatkan dari data kinerja yang akurat dari bagian-bagian pada Biro Hukum sendiri, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja organisasi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama (Eselon II)**  
**Biro Hukum Setda Provinsi Jambi**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	<b>1.</b> Persentase produk hukum provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%
		<b>2.</b> Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%
		<b>3.</b> Persentase Produk Hukum provinsi yang dapat diakses publik	100%	90%
		<b>4.</b> Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	80%	100%
		<b>5.</b> Nilai IKM	80	80

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 3. 4**  
**Kerangka Pengukuran Kinerja**

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 100 \%$	Sangat Baik
90-100 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
$\leq 49,99 \%$	Tidak Baik

#### 3.2.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

### 3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.5.**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 x 100%)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100 %
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%	90%	90%
		4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	80%	100%	100%
		5. Nilai IKM	80	80	100%

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

**Sasaran: MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBUTUHAN MASYARAKAT, DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.**

Dalam pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah digunakan indikator kinerja yaitu : persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik serta persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja** : persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

- Pengukuran persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Tahun 2022. Perbandingan target dan realisasi dilakukan terhadap persentase produk hukum provinsi yang telah difasilitasi dengan persentase produk hukum provinsi yang diajukan untuk difasilitasi pada tahun 2022.

Tabel 3.6

Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Produk Hukum Provinsi Yang difasilitasi

NO.	PRODUK HUKUM PROVINSI	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Perda	100%	100%	100%
2	Pergub	100%	100%	100%
3	Keputusan Gubernur	100%	100%	100%
	<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100 %</b>

Berdasarkan table diatas, jumlah produk hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi/evaluasi secara keseluruhan mencapai target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

**2. Indikator Kinerja : persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**

Pengukuran indikator kinerja persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan membandingkan realisasi produk hukum kabupaten/kota yang telah difasilitasi/evaluasi dengan target produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi/fasilitasi pada tahun 2022.

Tabel 3.7  
Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang difasilitasi

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	KOTA JAMBI	9,09%	8,88%	100 %
2	MUARO JAMBI	9,09%	8,88%	100 %
3	BATANGHARI	9,09%	8,88%	100 %
4	TANJUNG JABUNG BARAT	9,09%	10%	100 %
5	TANJUNG JABUNG TIMUR	9,09%	8,88%	100 %
6	BUNGO	9,09%	8,88%	100 %
7	TEBO	9,09%	8,88%	100 %
8	SAROLANGUN	9,09%	8,88%	100 %
9	SUNGAI PENUH	9,09%	8,88%	100 %
10	KERINCI	9,09%	8,88%	100 %
11	MERANGIN	9,09%	10%	100 %
	Jumlah Produk hukum	100%	100%	100 %
	<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100 %</b>

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi/fasilitasi pada tahun 2022 mencapai target, sehingga capaian kinerja dapat dinilai sebesar 100%.

### 3. Indikator Kinerja : persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik

- Pengukuran persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik dilakukan dengan cara membandingkan antara produk hukum yang telah diupload dalam sistem JDIH dengan produk hukum provinsi yang ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel 3.8

Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik

B e r d a s a r k a n	NO.	PRODUK HUKUM PROVINSI	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAAN KINERJA TAHUN 2022
	1	2	3	4	5
	1	Perda	90%	90%	100%
	2	Pergub	90%	90%	100%
		<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100 %</b>

Berdasarkan table diatas, jumlah produk hukum Provinsi Jambi yang diupload pada Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) sesuai dengan target kinerja dikarenakan tidak semua produk hukum dapat ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

### 4. Indikator Kinerja : persentase permasalahan hukum yang difasilitasi

- Pengukuran persentase permasalahan hukum yang difasilitasi dilakukan dengan cara membandingkan antara penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi dengan permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah pada Tahun 2022.

Tabel 3.9

Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Permasalahan hukum yang difasilitasi

NO.	Permasalahan hukum	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Permasalahan hukum litigasi	80%	80%	100%
2	Permasalahan hukum non litigasi	80%	80%	100%
	Jumlah Permasalahan hukum	80	80%	100%
	<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100 %</b>

Berdasarkan table diatas, jumlah permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan seluruhnya difasilitasi, dengan persentase keseluruhan 100%.

## 5. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran tingkat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 dilakukan dengan penyebaran Kuesioner pada masing-masing bagian dengan menilai setiap triwulan. Nilai capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan realisasi Nilai IKM dengan Target Nilai IKM tahun 2022.

Tabel 3.10: Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Skor IKM</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

Dapat dijelaskan disini bahwa untuk realisasi nilai IKM tahun 2023 sesuai dengan target kinerja, sehingga realisasi capaian kinerja atas indikator IKM adalah 100%.

### 3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.11.**

#### **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	<b>1.</b> Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		<b>2.</b> Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>3.</b> Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%	<b>100%</b>	<b>94,44%</b>	<b>100%</b>
		<b>4.</b> Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>5.</b> Nilai IKM	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>93,75%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2022 **sama** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 2) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah **sama..**
- 3) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik tahun 2022 lebih **tinggi** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 4) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi tahun 2022 samja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 5) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja IKM tahun 2022 dan skor IKM tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan (**lebih tinggi**).

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

**Sasaran :MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT**

**1. Indikator Kinerja :** persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Capaian Kinerja atas Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tahun 2021, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12: Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja  
 Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai  
 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  
 Tahun 2021

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
2	3	4	5
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%

Capaian Kinerja atas Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2020, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%.

Tabel 3.13: Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja  
 Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai  
 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  
 Tahun 2020

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
2	3	4	5
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%

**2. Indikator Kinerja : persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**

Capaian Kinerja atas Persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dan 2020, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Capaian Kinerja atas persentase produk hukum daerah kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2020 dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang difasilitasi  
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
2	3	4	5
Persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100 %

**3. Indikator Kinerja : persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik**

Capaian Kinerja atas Persentase produk hukum yang dapat diakses publik tahun 2021 dan 2020, dihitung dengan formula

membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Produk Hukum Provinsi yang didapat diakses publik  
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
2	3	4	5
Persentase produk hukum yang dapat diakses publik			
Perda	80%	80%	100%
Pergub	80%	90%	100%
<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100%</b>

Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Produk Hukum Provinsi yang didapat diakses publik  
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
2	3	4	5
Persentase produk hukum yang dapat diakses publik			
Perda	90%	80%	88,88%
Pergub	90%	90%	100%
Jumlah Persentase			94 %

#### 4. Indikator Kinerja : persentase permasalahan hukum yang difasilitasi

Capaian Kinerja atas Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi tahun 2021 dan 2020, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Permasalahan hukum yang difasilitasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Persentase Permasalahan hukum yang difasilitasi	80%	80%	100%
<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100 %</b>

Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Realisasi dan Capaian Kinerja atas  
Permasalahan hukum yang difasilitasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Persentase Permasalahan hukum yang difasilitasi	70%	70%	100%
<b>Jumlah Persentase</b>			<b>100 %</b>

**3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Target Kinerja 2022(sesuai dengan yang ada pada dok Renstra)	Capaian Kinerja atas Target Renstra Tahun 2021	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100 %	100 %	Tercapai
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	Tercapai

**3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

**Sasaran : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBUTUHAN MASYARAKAT, DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.**

- 1. Indikator Kinerja :** persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap peningkatan persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemrakarsa produk hukum provinsi
- 2) Meningkatkan koordinasi tingkat pusat terkait evaluasi dan fasilitasi produk hukum provinsi.

- 2. Indikator Kinerja : persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap peningkatan persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimbingan teknis penyusunan produk hukum dengan peserta dari Bagian Hukum pemerintah kabupaten/kota;
2. Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Bagian Hukum kabupaten/kota terkait permasalahan dalam rangka penyusunan produk hukum kabupaten/kota.
3. Memantapkan pelaksanaan monitoring ke kabupaten/kota terhadap pelaksanaan produk hukum hasil evaluasi/fasilitasi.
4. Meningkatkan koordinasi tingkat pusat terkait evaluasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota.

### 3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pendukung kinerja.

Tabel 3.21

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021	Serapan Anggaran (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100 %	2.464.005.776,- (96,08 %)	Efisiensi
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan	100%		

		perundang-undangan yang lebih tinggi			
		3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%		
		4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	100%		
		5. Nilai IKM	100%		

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa atas sasaran strategis Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.

### 3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.22

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Program	Kegiatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6 )	(7)	(8)
Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	<b>Tercapai</b>	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	<b>Tercapai</b>	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	90%	100%	<b>tercapai</b>	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan
	4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	80%	100%	<b>Tercapai</b>	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
	5. Nilai IKM	80	80	<b>tercapai</b>	Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sasaran : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT**

**1. Indikator Kinerja :** persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan telah menunjang keberhasilan pernyataan kinerja yaitu Indikator Kinerja persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**2. Indikator Kinerja :** persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwa Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota telah menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dengan Indikator Kinerja persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**3. Indikator Kinerja :** persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik.

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan dengan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya telah **mencapai** target yang diperjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kegiatan Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya sudah menunjang keberhasilan pernyataan kinerja terhadap indikator Kinerja persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik.

Secara keseluruhan Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Hukum menunjukkan ketercapaian kinerja antara target dan realisasi, yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pernyataan kinerja.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Biro Hukum menggunakan sumber dana APBD yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan. Pagu anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.564.560.000,- ( Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.464.005.776 atau 96,08 % sebagaimana tercatat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) terlampir.

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 Biro Hukum melaksanakan 2 Program dan 5 kegiatan dan 12 Sub kegiatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator di atas 90%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 3.23  
Realisasi Keuangan Tahun 2022

No	Program/ SubKegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Penyerapan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>245.315.110,00</b>	<b>233.571.270,00</b>	<b>96,97</b>	99,13	<b>2.643.840,00</b>
	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>14.868.000,00</b>	<b>90,69</b>	58,80	<b>1.632.000,00</b>
1.	- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000,00	4.440.000,00	88,80	88,80	560.000,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	99,00	50.000,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	5.478.000,00	84,28	84,28	1.022.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>395.000.000,00</b>	<b>386.911.075,00</b>	<b>98,69</b>	<b>39,69</b>	<b>8.088.925,00</b>
4.	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	85.000.000,00	84.995.200,00	99,99	99,99	4.800,00
5.	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000,00	301.915.875,00	97,39	97,42	8.084.125,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.553.500,00</b>	<b>95,54</b>	<b>24,85</b>	<b>446.500,00</b>
6.	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.553.500,00	95,54	95,00	446.500,00
	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>1.519.240.750,00</b>	<b>1.381.868.900,00</b>	<b>90,95</b>	<b>99,42</b>	<b>137.371.850,00</b>
	<b>Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan</b>	<b>1.166.000.000,00</b>	<b>1.119.058.565,00</b>	<b>96,53</b>	<b>96,53</b>	<b>46.941.435,00</b>

LKj Biro Hukum  
Tahun 2022

7.	- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	338.000.000,00	291.068.465	86,11	86,11	46.931.535,00
8.	- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	148.000.000,00	148.000.000	100,00	100,00	0,00
9.	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	300.000.000,00	300.000.000	100,00	100,00	0,00
10.	- Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	380.000.000,00	379.990.100	100,00	100,00	9.900,00
	<b>Fasilitas Bantuan Hukum</b>	<b>977.060.000,00</b>	<b>933.614.636,00</b>	<b>91,37</b>	32,18	<b>43.445.364,00</b>
11.	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	765.060.000,00	755.589.736	98,76	98,76	<b>9.470.264,00</b>
12.	Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	212.000.000,00	178.024.900	83,97	84,43	33.975.100,00
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>		<b>2.564.560.000,00</b>	<b>2.464.005.776,00</b>	<b>96,08</b>	<b>96,12</b>	<b>100.554.224,00</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) sub kegiatan, telah terlaksana dengan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan ini dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi sumber daya aparatur serta fasilitas yang tersedia pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi serta berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Meskipun secara umum kinerja Biro Hukum telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh karena itu masukan-masukan positif guna penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas Publik di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi masih sangat diperlukan, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum diharapkan akan lebih baik dan sempurna pada tahun-tahun yang akan datang.

